

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP EKAKAPTI KARANGMOJO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY AT SMP EKAKAPTI KARANGMOJO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Oleh: Fatih Hendri Danarhadi, filasafat dan sosiologi pendidikan, fip uny
hendrifatih1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat, 3) upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi hambatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, koordinator pendidikan inklusi, guru mata pelajaran serta GPK. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pendidikan inklusi ditransformasikan melalui SK SPPI, penunjukan GPK dan pelatihan inklusi dari dinas. SMP Ekakapti Karangmojo mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui penunjukan koordinator pendidikan inklusi, pemanfaatan SDM sekolah agar memiliki disposisi yang baik, manajemen keuangan inklusi, peningkatan sarana ramah ABK, kerja sama sekolah dengan berbagai pihak serta pembuatan kebijakan sekolah. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut adalah pelatihan dari dinas, disposisi SDM sekolah, sumber dana, peralatan, kerja sama guru dan kerja sama sekolah dengan berbagai pihak. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah terbatasnya GPK, belum maksimalnya intisari kebijakan inklusi, peralatan komputer, permasalahan ABK dan lingkungan luar sekolah. Upaya mengatasi hambatan dengan membuat kebijakan sekolah, yaitu kebijakan pelatihan mandiri sekolah, modifikasi kurikulum, kerjasama sekolah, penambahan jam belajar serta peningkatan keamanan lingkungan sekolah.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan, pendidikan inklusi*

Abstract

This study aims to describe 1) implementation of inclusive education policy at SMP Ekakapti Karangmojo, 2) supporting factors and inhibiting factors, 3) efforts made by schools in overcoming obstacles.

This research uses qualitative approach. Subjects in this study were principals, inclusive education coordinators, subject teachers and GPK. Methods of collecting data through interviews, observation and documentation. Stages in data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. Data validity is done by triangulation of source and technique.

The results show that the implementation of inclusive education policy is transformed through SK SPPI, GPK appointment and inclusive training from the department. SMP Ekakapti Karangmojo implements inclusive education through the appointment of inclusive education coordinators, the use of school human resources to have good dispositions, inclusive financial management, improved ABK friendly tools, school collaboration with various parties and school policy making. Factors supporting the implementation of the policy are training from the office, disposition of school human resources, funding sources, equipment, teacher cooperation and school cooperation with various parties. Factors inhibiting the implementation of the policy are the limited GPK, not maximally the essence of inclusive policy, computer equipment, ABK problems and environment outside school. Efforts to overcome obstacles by making school policies, namely self-employment school policies, curriculum modifications, school cooperation, the addition of learning hours and improvements to the school's environmental security.

Keywords: implementation, policy, inclusive education

PENDAHULUAN

Persoalan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi kajian penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah membuat kebijakan pendidikan inklusi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan inklusi menjadi tanggungjawab bagi setiap daerah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang merespon kebijakan pemerintah yang mewajibkan terselenggaranya pendidikan inklusi. Hal ini disebabkan karena kabupaten Gunung Kidul adalah Kabupaten dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus terbanyak di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Disisi lain, dari 2600 sekolah inklusi di Indonesia, sejumlah 242 berada di Kabupaten Gunung Kidul.

Walaupun kenyataannya belum tercapai secara maksimal, namun demikian, sudah

terdapat sekolah inklusi yang sudah memberikan pelayanan secara baik terhadap ABK dan memiliki fasilitas, kurikulum, guru serta komitmen bersama dengan masyarakat dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Sekolah tersebut adalah SMP Ekakapti Karangmojo yang beralamat di Jalan Karangmojo, Karangmojo, Gunung Kidul.

SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul merupakan sekolah menengah pertama inklusi tertua di kecamatan Karangmojo. Sekolah ini juga merupakan sekolah inklusi pertama di kabupaten Gunung Kidul yang menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 1990. Sekolah mendapatkan nilai sangat baik dalam hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari 242 sekolah inklusi pada tahun 2014 lalu. SMP Ekakapti mendapatkan nilai 82,40 dengan kategori nilai sangat baik.

Seluruh komponen pendidikan di SMP Ekakapti Karangmojo sudah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tertuang dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 dalam prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pendidikan inklusi. Sekolah ini juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan senantiasa meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat dalam membina anak berkebutuhan khusus.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan

tidak adanya penelitian implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo, sedangkan sekolah lain harus belajar dari SMP Ekakapti Karangmojo dalam pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Melihat hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo. Sebagai sekolah inklusi tertua dan terbaik di Kabupaten Gunung Kidul, sekolah ini merupakan sekolah favorit dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Peneliti ingin melihat implementasi pendidikan inklusi di sekolah ini dan bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik diantara 232 sekolah inklusi di Gunung Kidul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal tersebut untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang terjadi dilapangan.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2017.

Subjek Penelitian

Adapun subyek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, koordinator pendidikan inklusi, guru

pendamping khusus dan guru mata pelajaran. Karakteristik subyek penelitian didasarkan pada kompetensi dan posisi subyek dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan pedoman observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Proses analisis data yang dilakukan berupa: 1) *data reduction* (reduksi data), merangkum dan memilah hal/ data yang pokok; 2) *data display* (penyajian data), penyajian dalam uraian singkat; 3) *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan), agar makna dari penelitian ini dapat berarti dan dapat dideskripsikan dengan baik (Sugiyono, 2015: 91-99).

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan penggabungan antara triangulasi sumber dan teknik. Dalam mengabsahkan data, peneliti menggali beberapa narasumber dan menggunakan tiga teknik pencarian data, yaitu; observasi, dokumentasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Pendidikan Inklusi di SMP Ekakapti

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul sudah dilaksanakan sejak tahun 1990. Tahapan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah adalah dengan mengorganisasi, menginterpretasi dan mengaplikasikan kebijakan pendidikan inklusi.

Awal mula kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul adalah adanya penunjukan SK Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi dari Bupati Gunung Kidul. Berdasarkan SK SPPI tersebut, sekolah melakukan pengorganisasian kebijakan dengan menunjuk koordinator pendidikan inklusi yang bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan inklusi, baik masalah ABK, anggaran dana maupun sumber daya perlengkapan.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi kebijakan, yaitu tahapan penjabaran maksud, tujuan serta sasaran dari kebijakan pendidikan inklusi. Interpretasi kebijakan ternyata sudah dipahami oleh pemangku kebijakan karena sudah menjalankan pendidikan inklusi sejak tahun 1990. Hal itu didukung dengan berbagai pelatihan mandiri dan pelatihan dari dinas tentang kebijakan pendidikan inklusi. Pelatihan tersebut membawa

dampak bagi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus dan dalam memahami maksud dan tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut.

Tahapan terakhir adalah tahapan aplikasi, dimana tahapan ini dilakukan oleh pelaku kebijakan sekolah dengan cara mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya peralatan agar mampu bekerja secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. Dalam aplikasinya, hal yang paling diutamakan adalah memberikan pelayanan kepada ABK, karena tujuan pendidikan inklusi adalah pelaksanaan kebijakan yang tidak diskriminatif kepada siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Dalam pelayanannya, membutuhkan sumber daya dana, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Oleh sebab itu dapat dimaknai bahwa dalam aplikasi kebijakan pendidikan inklusi dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya dana dan peralatan untuk memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus agar tujuan dari kebijakan pendidikan inklusi dapat tercapai.

Sejalan dengan kebijakan inklusi yang memiliki berbagai permasalahan, sekolah membuat kebijakan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tanpa menunggu penyelesaian

dari pemerintah. Sekolah berasumsi bahwa ketika permasalahan dapat diatasi oleh sekolah, maka sekolah harus mandiri karena sekolah memiliki otonomi untuk mengurus kehidupannya sendiri.

Kebijakan yang dibuat oleh sekolah diantaranya adalah kebijakan pelatihan mandiri terhadap guru oleh sekolah dengan bekerja sama dengan GPK, kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya guru pembimbing khusus dalam jumlah dan dalam pembimbingan kepada ABK. Kebijakan selanjutnya adalah modifikasi kurikulum KTSP secara administratif agar pelayanan kepada ABK lebih terorganisir. Kebijakan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) dengan SMK Muhammadiyah Wonosari dalam kerja sama ujian nasional berbasis komputer, hal ini karena sekolah memiliki masalah dalam penyediaan sarana komputer ujian nasional.

Kebijakan sekolah yang selanjutnya adalah kebijakan penambahan jam belajar dan pendampingan khusus serta keamanan lingkungan sekolah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa ABK dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam sosialisasi dengan lingkungan.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh sekolah merupakan kebijakan mikro sekolah yang harus diaplikasikan oleh sekolah lain. Karena sekolah mengerti

permasalahan yang dihadapinya, maka sekolah harus aktif dalam upaya menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Hasil dari berbagai upaya sekolah dalam mengaplikasikan kebijakan pendidikan inklusi adalah sekolah menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil ini menjadi semangat bagi para guru untuk senantiasa memberikan pembimbingan dan pendampingan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti Karangmojo.

Unsur yang terlibat dalam proses kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi terdiri dari dimensi transformasi dan kejelasan kebijakn dari pemangku kebijakan. Kebijakan ditransformasikan Dinas DIKPORA DIY melalui SK SPPI, dana inklusi, penunjukan GPK. Kejelasan kebijakan pendidikan inklusi sudah dipahami karena pengalaman guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus dan berbagai diklat pendidikan inklusi dari dinas. Disisi lain, sekolah selalu berkomunikasi dengan dinas pendidikan dalam pencarian sumber daya dana dan peralatan tambahan dalam meningkatkan pelayanan sekolah kepada siswa berkebutuhan khusus.

Sumber daya yang harus ada dalam pendidikan inklusi adalah manusia, dana

dan perlengkapan. Sumber daya manusia di SMP Ekakapti sudah kompeten karena sudah bergelar sarjana pendidikan dan ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dari Dinas Pendidikan dan Pelatihan mandiri dari sekolah. Sumber daya dana berasal dari dana BOS, BOSDA dan sumbangan siswa yang ditopang dengan berbagai bantuan dari peralatan dari dinas. Sumber daya dana dan perlengkapan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia, yaitu pada disposisi/keinginan SDM yang menerima suatu kebijakan.

Sumber daya dana dan sumber daya peralatan yang mencukupi maka disposisi dari sumber daya manusia menjadi baik dan menerima kebijakan pendidikan inklusi. Hal ini sudah dibuktikan dengan keadaan sumber daya manusia di SMP Ekakapti yang memiliki disposisi relative tinggi karena kompetensinya, sumber daya dana dan sumber daya peralatan yang mencukupi kebutuhan sehingga memudahkan guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus.

Unsur yang terlibat dalam implementasi kebijakan di SMP Ekakapti Karangmojo berikutnya adalah disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaku kebijakan yang arah responnya menerima atau menolak sebuah kebijakan. Disposisi SDM di SMP Ekakapti menerima kebijakan pendidikan inklusi karena sumber daya dana dan perlengkapan

mendukung. Pelaku kebijakan juga memahami dan mendalami pendidikan inklusi melalui berbagai pelatihan dan pengalaman sehingga menerima pendidikan inklusi.

Struktur birokrasi yang ada di SMP Ekakapti sudah sesuai dengan amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 yang menganjurkan dibentuknya Hasil penelitian di atas yang mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi sudah berjalan dengan baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia di SMP Ekakapti Karangmojo yang sangat mendukung kebijakan pendidikan inklusi, dibuktikan dengan komitmen yang tinggi dalam melayani dan membimbing siswa berkebutuhan khusus. Prestasi SMP Ekakapti Karangmojo sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik di Kabupaten Gunung Kidul juga menjadi bukti bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusinya sudah baik karena mendapatkan nilai dengan kategori nilai sangat baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo adalah banyaknya pelatihan pengelolaan dan pelayanan pendidikan inklusi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. Berbagai pelatihan

menyebabkan disposisi/ keinginan SDM di SMP Ekakapti menerima kebijakan pendidikan inklusi. Disposisi yang positif juga didukung oleh sumber dana inklusi, dana sukarela dan dana hibah dari berbagai pihak untuk alokasi kebijakan.

Sumber daya peralatan dan akses sekolah yang ramah ABK serta kerja sama yang solid antar guru dalam menyelesaikan masalah ABK dan meningkatkan kemampuan pelayanan ABK juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Dan yang tidak kalah penting adalah sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga sekolah mendapatkan banyak manfaat yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo adalah terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus yang berdampak pada kurangnya jam mengajar di sekolah. Disisi lain, intisari kebijakan inklusi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini diperparah dengan minimnya sumber daya komputer untuk ujian nasional.

Berbagai permasalahan yang dialami siswa berkebutuhan khusus juga menghambat implementasi kebijakan. Lingkungan luar sekolah yang memberikan pengaruh negatif bagi siswa menjadi faktor penghambat.

3. Strategi Mengatasi Hambatan

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan membuat kebijakan sekolah. Kebijakan pelatihan mandiri sekolah untuk mengatasi masalah waktu GPK, kebijakan modifikasi kurikulum agar intisari kebijakan pendidikan inklusi tercapai,

Penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) dengan SMK Muhammadiyah Wonosari untuk menyelesaikan kekurangan UNBK, kebijakan penambahan jam belajar dan pendampingan khusus untuk mengatasi masalah ABK dan kebijakan peningkatan keamanan lingkungan sekolah agar siswa tidak terpengaruh lingkungan luar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang tidak diskriminatif kepada siswa berkebutuhan khusus, sudah dilaksanakan dengan baik oleh SMP Ekakapti Karangmojo. Transformasi kebijakan pendidikan inklusi dari pemerintah kepada sekolah dilaksanakan melalui SK SPPI kepada sekolah, penunjukan guru pembimbing khusus dan pelatihan pendidikan inklusi dari dinas. SMP Ekakapti mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui penunjukan koordinator pendidikan inklusi, pemanfaatan SDM

sekolah agar memiliki disposisi yang baik terhadap pendidikan inklusi, manajemen sumber daya keuangan inklusi, peningkatan sarana prasarana sekolah yang ramah ABK, kerja sama sekolah dengan berbagai pihak serta pembuatan kebijakan sekolah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo adalah: a) Pelatihan pengelolaan dan pelayanan pendidikan inklusi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi; b) Disposisi/ keinginan SDM di sekolah yang menerima kebijakan pendidikan inklusi; c) Sumber dana inklusi, dana sukarela dan dana hibah dari berbagai pihak; d) Sumber daya peralatan dan akses sekolah yang ramah ABK; e) Kerja sama yang solid antar guru dalam menyelesaikan masalah ABK dan meningkatkan kemampuan pelayanan ABK; f) Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak.
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo adalah: a) Terbatasnya guru pembimbing khusus; b) Intisari kebijakan inklusi yang belum dilaksanakan secara maksimal; c) Minimnya sumber daya komputer untuk ujian nasional; d) Berbagai permasalahan yang dialami siswa berkebutuhan khusus; e) Lingkungan luar sekolah yang memberikan

pengaruh negatif bagi siswa.

4. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh sekolah melalui berbagai kebijakan sekolah, yaitu: a) Kebijakan pelatihan mandiri sekolah; b) Kebijakan modifikasi kurikulum; c) Penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) dengan SMK Muhammadiyah Wonosari; d) Penambahan jam belajar dan pendampingan khusus; e) Peningkatan keamanan lingkungan sekolah.

Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang didapat, maka saran yang diberikan kepada kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah perlu menambah GPK secara mandiri tanpa menunggu dari Dinas, yaitu melalui perekrutan GPK secara mandiri dari sekolah.
2. Sekolah perlu menunjuk ulang koordinator pendidikan inklusi agar tugas dan tanggungjawabnya menjadi lebih jelas.
3. Perlu adanya perhatian lebih terhadap kebersihan lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2001). *Kebijakan pendidikan*. Buku Ajar, Universitas Negeri Yogyakarta.
- _____ (2009). *Kebijakan pendidikan*. Buku Ajar, Universitas Negeri Yogyakarta.

- _____ (2012). *Kebijakan pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Budianto, dkk. (2010). *Modul pelatihan pendidikan inklusi edisi revisi*. Jakarta.
- Dedi Kustawan. (2012). *Pendidikan inklusif dan upaya implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan pendidikan pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heri Sidiq. (2013). *Gunung Kidul targetkan anak inklusif dapat pendidikan*. Yogyakarta. Akses di <http://jogja.antaranews.com/berita/313180/gunung-kidul-targetkan-anak-inklusi-dapat-pendidikan>) diakses 12 September 2016.
- Imam Gunawan. (2014). *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo. (2006). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Bayu Media.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Takdir Illahi. (2013). *Pendidikan inklusi, konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Murdjito, dkk. (2012). *Pendidikan inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
- Nanang Fatah. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Sudiyono. (2007). *Dari formulasi ke implementasi kebijakan pendidikan*. Buku Ajar, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyanto. (2015). *Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta*. S1 Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi pendidikan untuk semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.
- Terry Irenewaty dan Aman. (2007). *Evaluasi kebijakan pendidikan inklusi di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.